

SD AISITYYAH PERTAMA DI BREBES Pusat Pengkaderan Muhammadiyah dan Bangsa

BREBES (KR) - Sekolah Dasar (SD) Aisiyyah di Kabupaten Brebes Jateng jangan hanya dipahami sebagai pusat perkaderan Muhammadiyah semata. Tetapi keberadaannya harus dinilai sebagai pusat perkaderan bangsa. Karena Muhammadiyah maupun Aisiyyah selalu berkomitmen mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa terkecuali.

Hal tersebut dikemukakan Wamendikdasmen Fajar Riza UI Haq dalam Groundbreaking SD Aisiyyah pertama di Kabupaten Brebes, Rabu (9/4). Wamendikdasmen Fajar didampingi Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Kepala UPT, Kepala Dinas Pendidikan Brebes dan DPRD setempat.

Fajar menyampaikan pentingnya semua pihak bergotong royong dan mengambil peran untuk berkontribusi optimal agar SD Aisiyyah pertama di Brebes ini segera terwujud.

"Pelatakan batu pertama SD Aisiyyah

di Brebes ini memiliki nilai ibadah dan akan menjadi sejarah jika segera kita wujudkan. Ayo berbagi tanggung jawab," ajaknya.

Fajar juga mendorong agar SD pertama milik Aisiyyah di Brebes ini menjadi pusat keunggulan yang tidak hanya fokus pada hafalan, tapi memperkuat literasi dan numerasi. SD Aisiyyah ini, disebutnya, memiliki peluang. Apalagi sebagaimana selalu dikemukakan Mendikdasmen Abdul Mu'ti yang ingin hadir untuk semua. Mengingat misi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua tanpa melihat negeri atau swasta.

Kepala Dinas Pendidikan Brebes, Saridah menyampaikan komitmen akan mendukung pembangunan SD Aisiyyah pertama di Kabupaten Brebes. Diharapkan, SD ini menjadi *pilot project*, sehingga dapat menjadi model pendidikan bagi yang lain. **(Fsy)-d**

MAHASISWA ASAL YAMAN TURUT DIWISUDA UMS Luluskan 1.465 Sarjana Baru

SOLO (KR) - Ali Essam Ali Al-Sanaani, lulusan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) asal Yaman ikut diwisuda Rektor Prof Dr Sofyan Anif MSi di Edutorium KH Ahmad Dahlan, Jumat (11/4). Ia satu-satunya mahasiswa asing yang diwisuda bersama 2.389 lulusan yang lain.

Ali Essam mengaku bangga berhasil meraih sarjana dari UMS. Hal itu ia ungkapkan ketika dipercaya mewakili para wisudawan. UMS telah menjadi tempat yang istimewa baginya maupun mahasiswa asing lainnya. "Di sini kita tidak hanya menimba ilmu, tapi juga melatih kerja keras. Saya bangga menjadi lulusan dari UMS," ucap Ali.

Kepala Biro Administrasi dan Akademik UMS, Dr Triyono MSi menyebutkan, jumlah mahasiswa asing di UMS ada 192 orang. Mereka menempuh studi S1, S2 dan



Ali Essam Ali Al-Sanaani

Harun Joko Prayitno MSi menjelaskan, lulusan yang meraih predikat cumlaude terus meningkat. Saat ini tercatat 1.207 cumlaude. Pada periode sebelumnya 42 persen, sekarang 50,2 persen.

Rektor Sofyan Anif berpesan agar alumni UMS menjaga nama baik almamater dengan menjadi pribadi yang berkarakter. **(Qom)-d**

Guru KI untuk Edukasi Kekayaan Intelektual

YOGYA (KR) - Kekayaan intelektual (KI) adalah bagian dari keseharian bangsa ini, mulai dari karya seni, teknologi, hingga produk kreatif. Memberi pemahaman ini sejak awal menjadi bekal penting untuk masa depan generasi muda.

"Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) DIY membuka kesempatan bagi sekolah-sekolah di DIY untuk mengakses layanan edukasi tentang Kekayaan Intelektual (KI) melalui program 'Guru KI,'" tutur Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto kepada *KR*, Kamis (10/4)

Pihaknya, siap membantu memberikan pemahaman mendasar tentang pentingnya perlindungan hak cipta, merek, paten

dan aspek KI lainnya kepada generasi muda. "Sebelumnya, inisiatif ini telah dilaksanakan di sejumlah SMA di Kota Yogyakarta dengan respons positif. Guru-guru yang terlibat dilatih untuk menyampaikan materi KI secara interaktif, disesuaikan tingkat pemahaman siswa," jelasnya.

Kanwil Kemenkum DIY mengundang sekolah-sekolah, baik tingkat dasar maupun menengah, untuk memanfaatkan pro-



KR-Istimewa

Agung Rektono Seto

gram ini. "Kami siap mendatangi sekolah atau menyediakan fasilitas diskusi di kantor kami. Tujuannya, agar KI tidak dipandang sebagai hal yang rumit, melainkan sesuatu yang dekat dengan kehidupan," tegasnya.

UIN Walisongo Resmi Dirikan FK

SEMARANG (KR) - Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi No 193/B/O/2025 memastikan, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang resmi mendirikan Fakultas Kedokteran (FK) yang tak hanya menambah deretan PTKIN dengan program studi kedokteran, tetapi bakal membawa kekhasan dan visi transformasional yang berbeda dari fakultas kedokteran lainnya.

Program Studi (prodi) Kedokteran dan Program Profesi Dokter UIN Walisongo akan menekankan pendekatan kedokteran regeneratif berbasis riset, serta menjadi satu-satunya Fakultas Kedokteran di Indonesia yang menyediakan wahana pembelajaran Stem Cell untuk riset kanker. Hal ini menjadi langkah strategis UIN Walisongo untuk hadir sebagai pelopor pendidikan medis yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga inovatif dan solutif terhadap tantangan kesehatan modern.



KR-Rini Suryati

Amien Suyitno

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menyambut antusias hadirnya FK UIN Walisongo sebagai bagian dari wajah baru transformasi pendidikan tinggi Islam. Menurutnya, fakultas ini menjadi bentuk konkret pengamalan Kurikulum CINTA, ruh dari pendidikan

Islam masa kini.

"Kita ingin melahirkan dokter-dokter muslim yang mencintai Allah dengan ilmu yang diamalkan, mencintai sesama dengan pelayanan kemanusiaan, mencintai lingkungan melalui praktik medis berkelanjutan dan mencintai bangsa lewat kontribusi nyata dalam kesehatan masyarakat," terang Amien.

Hal senada disampaikan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Sahiron, yang menekankan, pendirian FK UIN Walisongo telah melewati proses seleksi ketat terkait kesiapan SDM, infrastruktur dan sistem penjaminan mutu. Ia menyebut, Kemenag terus mendorong PTKIN menjadi pusat keunggulan dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan.

Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof Nizar, menegaskan, fakultas ini dirancang untuk mencetak dokter muslim yang berkarakter kuat, religius dan memiliki kepekaan sosial tinggi. **(Ati)-d**

EKONOMI

SUNERGI INTERSYSTEM DAN ICS COMPUTE Atasi Interoperabilitas Data Kesehatan



KR- Istimewa

Kolaborasi InterSystem dengan ICS Compute.

JAKARTA (KR) - Dalam langkah penting untuk sektor kesehatan di Indonesia, InterSystems, penyedia teknologi data inovatif yang berkomitmen membantu pelanggan mengatasi tantangan kritis terkait skalabilitas, interoperabilitas dan kecepatan, mengumumkan kemitraan strategis dengan ICS Compute, perusahaan konsultasi dan layanan TI yang menyediakan solusi cloud, GenAI, dan keamanan siber di Indonesia.

Melalui kolaborasi ini, ICS Compute bertindak sebagai enabler dalam mengimplementasikan interoperabilitas data kesehatan, memanfaatkan platform InterSystems IRIS for Health dan InterSystems Supply Chain Orchestrator.

Kerja sama ini menandai langkah signifikan dalam mempercepat transformasi digital layanan kesehatan di Indonesia, dengan fokus pada pengembangan ekosistem kesehatan yang lebih komprehensif.

Transformasi digital di sektor kesehatan memerlukan kemampuan data dari berbagai sistem untuk saling terhubung dan digunakan secara kolaboratif melalui

interoperabilitas data. Sayangnya, studi menunjukkan bahwa 74% organisasi kesehatan di Indonesia masih menghadapi kesulitan dengan interoperabilitas data, terutama mengingat tantangan geografis dan distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata.

Meskipun Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 telah menekankan pentingnya interoperabilitas, masih ada kesenjangan dalam kemampuan untuk berbagi dan memanfaatkan data secara efektif.

Untuk menjawab tantangan ini, ICS Compute menawarkan solusi interoperabilitas data yang dirancang khusus untuk kebutuhan sistem kesehatan di Indonesia. Solusi ini mencakup Clinical Data Repository, proses onboarding yang cepat ke 'SATUSEHAT' serta dasbor analitik/BI yang menampilkan data FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) yang sudah distandarisasi.

Fitur-fitur ini memudahkan penyedia layanan kesehatan dalam mengakses dan memanfaatkan data pasien secara menyeluruh, serta memungkinkan pela-

cakan data dan pesanan secara real-time dan pengelolaan distribusi yang lebih efisien bagi organisasi farmasi. Semua ini dibangun di atas platform InterSystems IRIS for Health dan InterSystems Supply Chain Orchestrator, yang membantu menghadirkan informasi berbasis data yang dapat langsung digunakan.

"Kolaborasi ini menunjukkan komitmen ICS Compute dan InterSystems untuk menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan organisasi kesehatan dalam mewujudkan transformasi kesehatan digital di Indonesia," kata Budhi Wibawa, CEO dan Pendiri ICS Compute, Jumat (11/4).

Dengan menggabungkan keahlian dan sumberdaya kedua perusahaan, ia berharap dapat menciptakan inovasi dan solusi yang dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. "Platform IRIS for Health akan memberdayakan penyedia layanan kesehatan dan apotek di Indonesia untuk membuka wawasan real-time, meningkatkan pengambilan keputusan klinis dan mendorong efisiensi operasional dengan mengintegrasikan perangkat medis, Rekam Medis Elektronik (EMR), dan analitik AI canggih," kata Budhi Wibawa.

Luciano Brustia, Regional Managing Director, Asia Pacific, InterSystems, yang menyatakan antusiasmenya tentang kemitraan ini. "Kolaborasi ini, langkah penting dalam misi kami untuk meningkatkan penyampaian layanan kesehatan di Indonesia," tambahnya. **(Rsv)-d**

BSI OPTIMALKAN EKOSISTEM PASAR

Fokus Garap Transaksi Ritel UMKM

YOGYA (KR) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) semakin fokus mengoptimalkan transaksi ritel di pasar-pasar tradisional dengan menggarap klaster atau ekosistem pasar untuk memperkuat inklusi keuangan syariah pelaku UMKM.

Direktur Distribution & Sales BSI Anton Sukarna mengatakan, pasar adalah salah satu pusat ekonomi masyarakat di tataran akar rumput. Penguatan melalui pemberdayaan ekosistem pasar dinilai akan semakin memperkokoh ketahanan ekonomi masyarakat dengan instrumen keuangan syariah.

"Saat ini BSI menasar pasar untuk membangun ekosistem halal yang nantinya terhubung dari hulu hingga hilir mulai produksi hingga penjualan di pasar. Pasar menjadi salah satu pusat ekonomi daerah untuk mendorong peningkatan ekonomi. Pasar Beringharjo Yogyakarta menjadi yang pertama sebagai wu-

jud ekosistem pasar, mengingat Yogyakarta sebagai kota wisata dan menjadi destinasi wisata nasional," kata Direktur Distribution & Sales BSI Anton Sukarna, di Yogyakarta, Kamis (10/4).

Anton menjelaskan, ada beberapa potensi layanan perbankan syariah dari BSI yang terus dikembangkan di pasar. Di antaranya BSI Agen, QRIS dan EDC.

Hal ini bertujuan pula mendorong transaksi keuangan syariah digital agar masyarakat lebih aman, cepat dan mudah dalam bertransaksi.

Dengan demikian, kata Anton, inklusi pun akan meningkat seiring dengan semakin luasnya akses layanan yang bisa digunakan

seluruh segmen nasabah. Ditambah lagi minat dan preferensi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan dan perbankan syariah. "Kami akan optimalkan potensi transaksi melalui BSI Agen, QRIS dan EDC untuk digitalisasi transaksi di pasar. Selain itu juga BSI terus edukasi investasi emas bagi pedagang dan wirausaha, serta pembiayaan untuk perputaran modal usaha sesuai segmen yakni mikro, maupun kecil dan menengah," ujarnya.

Total merchant QRIS BSI di area Yogyakarta sudah ada 21.000. Dengan total transaksi hingga Maret Rp 16,3 miliar dan jumlah transaksi lebih dari 3.500 per merchant. Sedangkan total number of account (NOA) wirausaha sebanyak 4.545 nasabah. "Segmen usaha didominasi oleh pedagang besar daneceran, wirausaha makanan dan minuman,

sosial budaya dan kerajinan," jelasnya.

Anton menambahkan, melalui pemberdayaan klaster pasar diharapkan inklusi jasa keuangan dan perbankan syariah di tataran pelaku ekonomi akar rumput semakin tumbuh dan kian kuat. Hal tersebut sejalan dengan upaya BSI menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu katalis pembangunan ekonomi nasional.

Terlebih pelaku UMKM memiliki peran besar terhadap perekonomian nasional. Mengutip data Kemenko Perekonomian, peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia terlihat dari kontribusinya yang mencapai 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan menyerap hampir 97 persen total tenaga kerja di seluruh Indonesia. BSI sendiri selama ini terus memacu pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM. **(Lmg)-d**

SOAL PELONGGARAN KEBIJAKAN TKDN

Pemda DIY Tunggu Instruksi Pusat

YOGYA (KR) - Pemda DIY masih menunggu instruksi atau regulasi resmi dari pemerintah pusat sebelum melakukan penyesuaian pelonggaran kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hal itu dilakukan, karena Pemda DIY harus berpedoman pada aturan yang berlaku. Sementara itu, sampai saat ini belum ada surat edaran atau arahan baru dari Kementerian terkait perubahan kebijakan TKDN tersebut.

"Kalau soal pelonggaran kebijakan TKDN Pemda DIY masih menunggu instruksi resmi dari pusat. Prinsipnya Disperindag DIY mengikuti regulasi dan ketentuan yang diberlakukan pemerintah pusat," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Yuna Pancawati, Kamis (10/4).

Yuna mengatakan, perubahan kebi-

jakan merupakan hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan. Namun, untuk saat ini, Pemda DIY memilih bersikap menunggu. Jadi begitu regulasi resmi telah diterbitkan, pihaknya segera menyesuaikan pelaksanaan di daerah.

Karena TKDN sejauh ini berfungsi sebagai semacam non-tarif barrier yang secara tidak langsung melindungi pasar domestik dari banjir produk asing. Apabila pelonggaran TKDN diberlakukan, konsekuensi logisnya adalah meningkatnya volume produk impor yang masuk ke pasar nasional.

Menurut Yuna, meski belum memiliki data pasti, sektor industri lokal yang memiliki kompetitor impor akan menjadi pihak paling rentan terdampak. Sejumlah sektor seperti furnitur, mainan anak dan produk logam

sebagai contoh industri bisa terpengaruh jika pelonggaran TKDN benar-benar dilaksanakan.

Seperti diketahui instruksi pelonggaran TKDN pertama kali disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sarasehan Ekonomi Nasional di Jakarta. Dalam forum itu, Prabowo menyebut, penerapan TKDN yang terlalu kaku membuat industri nasional kehilangan daya saing. Prabowo menilai, kebijakan tersebut sebaiknya dibuat fleksibel dan bahkan bisa digantikan dengan insentif.

"Disperindag DIY belum menyampaikan apakah akan ada forum koordinasi lintas OPD untuk menyikapi kemungkinan perubahan tersebut. Namun, kami siap untuk menjalankan apapun kebijakan yang ditetapkan pusat," tambahnya. **(Ria)-d**